

POLICY BRIEF

“Pendampingan Psikososial di Sekolah Rakyat: Penguatan Peran Guru dan Psikolog dalam Pendidikan Berasrama”

disusun oleh
Lutfina Thalita Erica Zainsa, S.H.
Avrina Dwijayanti, S.IP., M.Phil

ditujukan kepada:

- Kementerian Sosial
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Lembaga Administrasi Negara

Executive Summary

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera dan putus sekolah melalui sistem pendidikan berasrama. Sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, aspek pendampingan psikososial menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini dikarenakan peserta didik sekolah rakyat berasal dari latar belakang yang membutuhkan dukungan materi dan pendampingan khusus lebih intens. Berdasarkan data Kementerian Sosial per September 2025, total peserta didik Sekolah Rakyat berjumlah 15.895 orang, terdiri dari 3.225 siswa tingkat SD, 5.930 siswa tingkat SMP, dan 6.740 siswa tingkat SMA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, pelaksanaan pendampingan psikososial masih menghadapi tantangan dari sisi kompetensi guru, kesiapan sistem keasramaan, dan keterlibatan tenaga profesional.

Sejumlah kasus menunjukkan adanya siswa yang mengalami stres, kesepian, dan bahkan meninggalkan asrama karena kesulitan adaptasi. Berdasarkan data Kementerian Sosial (2025), tercatat sebanyak 114 siswa Sekolah Rakyat memilih untuk mengundurkan diri. Guru, sebagai figur utama di sekolah, menghadapi peran ganda sebagai pengajar dan pengasuh tanpa pelatihan psikososial yang memadai. Kementerian Sosial telah menyusun enam panduan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang meliputi Panduan Kedisiplinan, Panduan Pelaksanaan Program Keasramaan, Panduan Kesehatan dan Lingkungan, Panduan Pendampingan Psikologis Remaja, Panduan Pelaksanaan Program Persiapan, serta Panduan Tugas Wali Asuh dan Wali Asrama. Panduan tersebut memberikan dasar teknis pelaksanaan program berasrama. Namun, substansi yang berkaitan dengan kompetensi psikososial guru, kemampuan life coaching, dan dukungan psikolog profesional masih perlu diperkuat agar tujuan pembinaan karakter dan kemandirian siswa dapat tercapai secara optimal.

Policy brief ini merekomendasikan penguatan kapasitas guru dan wali asuh melalui pengembangan Modul Nasional Pendampingan Psikososial, pelatihan life coaching bagi tenaga pendidik, serta pelibatan psikolog profesional dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pembinaan berasrama yang berorientasi pada kesejahteraan mental, pengembangan karakter, dan perubahan pola pikir siswa menuju kemandirian.

PENDAHULUAN

Istilah psikososial berasal dari dua kata yaitu "psiko" yang berarti aspek psikologis individu seperti pikiran, emosi, dan perilaku, serta "sosial" yang berarti interaksi dan hubungan seseorang dengan lingkungannya. Dengan demikian, psikososial menggambarkan keterkaitan antara kondisi psikologis seseorang dengan interaksi sosialnya. Dalam konteks pendidikan, kesejahteraan psikososial mencakup kemampuan siswa dalam mengelola emosi, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan lingkungan belajar secara positif.

Menurut teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson (1963), setiap individu melalui tahapan perkembangan yang melibatkan konflik psikologis dan sosial yang harus diatasi untuk membentuk kepribadian yang sehat. Sementara itu, WHO (2022) mendefinisikan kesejahteraan psikososial sebagai kondisi seimbang antara kesehatan mental individu dan kemampuannya berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks Sekolah Rakyat, pendampingan psikososial memiliki peran penting dalam membantu siswa yang tinggal di lingkungan berasrama. Siswa perlu beradaptasi secara emosional dan sosial, membangun hubungan positif dengan guru dan teman sebaya, serta mengembangkan kepercayaan diri dan kemandirian. Pendampingan ini bertujuan menjaga kesehatan mental siswa, meningkatkan kemampuan adaptasi, menumbuhkan empati, serta membangun karakter yang tangguh dan berdaya. Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai wadah pembinaan sosial dan psikologis bagi peserta didik. Hingga September 2025, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp788,7 miliar dengan target pembangunan 500 (lima ratus) Sekolah Rakyat pada tahun 2029 (Kemenkeu, 2025). Program Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

Beberapa laporan media menunjukkan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat juga menghadapi tantangan psikologis di kalangan peserta didik. Sebagaimana diberitakan oleh Detik Edu (2025), terdapat sejumlah kasus siswa yang mengalami stres dan bahkan meninggalkan sekolah karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan berasrama. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun tujuan program untuk membentuk kemandirian siswa sudah jelas, dukungan terhadap aspek psikososial mereka belum optimal dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Kementerian Sosial telah menerbitkan enam buku panduan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan berasrama. Panduan tersebut telah mencakup berbagai aspek teknis, seperti tata tertib, kesehatan, keasramaan, dan pendampingan psikologis remaja. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian guru, wali asuh, dan tenaga pendidik masih menghadapi kesulitan dalam memberikan pendampingan psikososial yang efektif. Peran mereka yang seharusnya menjadi figur pembimbing, pengasuh, sekaligus penggerak motivasi siswa belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan kemampuan dalam memahami aspek emosional dan sosial peserta didik.

Selain itu, belum terdapat sistem pelatihan yang secara khusus membekali guru dan wali asuh dengan pendekatan life coaching dan keterampilan konseling dasar. Pendekatan ini penting untuk membantu siswa mengenali potensi dirinya, mengatasi hambatan psikologis, serta membentuk pola pikir positif dan mandiri. Keterlibatan psikolog profesional di sekolah juga masih terbatas, padahal peran psikolog sangat penting dalam melakukan asesmen, intervensi, serta supervisi terhadap pelaksanaan pendampingan psikososial di lingkungan sekolah berasrama.

DESKRIPSI MASALAH

Analisis dalam dokumen ini diperkuat oleh survei lapangan terhadap 25 responden (wali asuh, guru, dan tenaga kependidikan) dari Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan. Survei ini memberikan gambaran empiris mengenai pola pendampingan, kapasitas SDM, dan tantangan psikososial di lingkungan asrama. Berikut beberapa temuan lapangan:

Pertama, Kapasitas guru dan wali asrama masih terbatas dalam memberikan pendampingan psikososial kepada siswa. Meskipun mereka memegang tanggung jawab langsung dalam pembinaan keseharian siswa di lingkungan berasrama. Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi: sebanyak 7 wali asuh telah mengikuti pelatihan psikososial, sedangkan 4 wali asuh belum pernah mengikuti pelatihan apa pun, menggambarkan belum adanya standar pelatihan yang diterapkan secara merata. Dengan masa kerja rata-rata yang masih baru (3–6 bulan), kebutuhan pelatihan lanjutan menjadi semakin mendesak untuk memastikan kualitas pendampingan yang konsisten. Survei juga menemukan bahwa seluruh guru belum pernah mendapatkan pelatihan psikososial, sehingga kemampuan mereka dalam mendampingi siswa masih bersifat intuitif, yaitu mengandalkan pengalaman pribadi dan penilaian spontan tanpa menggunakan teknik konseling dasar, pendekatan komunikasi empatik terstruktur, atau metode asesmen psikologis yang baku. Keterbatasan ini penting dicermati mengingat guru menghadapi berbagai permasalahan psikososial siswa, termasuk konflik antar teman, pelanggaran disiplin, kesulitan adaptasi, penarikan diri secara sosial, hingga stress emosional. Minimnya pelatihan bagi guru dan wali asuh menyebabkan pembinaan kepribadian dan pengelolaan stres siswa belum dapat dilakukan secara optimal.

Kedua, meskipun telah tersedia enam panduan dari Kementerian Sosial, sebagian besar isi panduan masih menitikberatkan pada tata laksana keasramaan dan kedisiplinan, bukan pada aspek kompetensi psikososial guru dan tenaga pendidik. Panduan yang ada belum diintegrasikan secara sistemik ke dalam modul pelatihan guru maupun mekanisme evaluasi kesejahteraan psikologis siswa. Akibatnya, guru dan wali asuh tidak memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga praktik pendampingan menjadi tidak seragam dan sulit dievaluasi.

Ketiga, belum terdapat sistem pelatihan berkelanjutan yang mendorong guru dan wali asuh berperan sebagai coach bagi siswa. Hasil survei menunjukkan kompetensi psikososial mereka masih rendah pada aspek konseling dasar dan life coaching, sementara kemampuan komunikasi empatik dan motivasi siswa berada pada tingkat sedang. Padahal, berbagai penelitian menegaskan efektivitas pendekatan coaching: studi J-PAL South Asia (2019) menunjukkan program life skills menurunkan angka putus sekolah hingga 31 persen, Kadir & Umiarso (2023) menemukan bahwa sistem coaching dan iklim organisasi yang baik meningkatkan efektivitas pengasuh pesantren, dan Wahono et al. (2025) menunjukkan pendidikan berbasis life skills berkontribusi 43 persen terhadap kemandirian siswa. Tanpa pelatihan yang terstruktur, guru akan kesulitan mendorong perubahan pola pikir siswa dari ketergantungan menjadi mandiri.

Keempat, keterlibatan psikolog dalam lingkungan Sekolah Rakyat masih bersifat insidental dan belum diatur secara kelembagaan. Padahal, dukungan psikolog profesional dibutuhkan untuk melakukan asesmen psikologis, memberikan layanan rujukan kasus, serta mendampingi guru dalam melaksanakan pendampingan berbasis keilmuan. Hasil survei menunjukkan bahwa ketimpangan dukungan profesi psikologi belum tersedia secara sistematis di seluruh Sekolah Rakyat, sehingga wali asuh dan guru sering kali harus menangani kasus psikososial tanpa supervisi profesional. Temuan ini mempertegas urgensi pembentukan mekanisme pelayanan psikososial yang lebih terstruktur dan keberadaan tenaga ahli yang dapat memberikan pendampingan profesional secara berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kondisi kondisi yang menjadi kendala dan masalah berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan pembinaan karakter dan kesejahteraan siswa di Sekolah Rakyat, sehingga diperlukan langkah kebijakan yang memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi lintas profesi dalam sistem pendidikan Sekolah Rakyat sebagai berikut:

- 1 Pengembangan Modul Nasional Pendampingan Psikososial Sekolah Rakyat**

Pemerintah perlu mengadaptasi dan mengintegrasikan substansi dari enam panduan Kemensos ke dalam satu Modul Nasional Pendampingan Psikososial Sekolah Rakyat. Modul ini harus menitikberatkan pada aspek kesejahteraan mental siswa, komunikasi empatik, teknik konseling dasar, serta manajemen dinamika kehidupan berasrama. Penyusunan modul dilakukan secara kolaboratif antara Kemendikdasmen sebagai mitra yang bertugas menyiapkan guru dan menyusun kurikulumnya, serta bekerjasama dengan lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk memastikan keterpaduan antara substansi pendidikan, sosial, dan kebijakan.
- 2 Pembentukan Unit Layanan Psikososial Sekolah Rakyat**

Setiap Sekolah Rakyat perlu memiliki Unit Layanan Psikososial Sekolah Rakyat yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan pendampingan psikologis dan sosial. Unit ini dapat beranggotakan guru, wali asuh, perwakilan siswa, serta dapat melibatkan tenaga profesional eksternal seperti psikolog dan konselor. Unit ini bertugas melakukan pemantauan kesejahteraan emosional siswa, penanganan kasus, dan pelaporan berkala kepada dinas terkait.
- 3 Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Siswa**

Pemerintah perlu menetapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pendampingan psikososial di Sekolah Rakyat. Kemendikdasmen bersama Kementerian Sosial menjadi penanggung jawab utama penyusunan instrumen dan standar monev, sementara pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial bertugas melaksanakan monev di tingkat sekolah. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang mengukur indikator adaptasi sosial, kebahagiaan belajar, dan dukungan emosional siswa. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pengembangan pelatihan bagi tenaga pendidik.
- 4 Pelatihan *Life Coaching* bagi Guru, Wali Asuh dan Tenaga Pendidik**

Program pelatihan life coaching perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembinaan sumber daya manusia di Sekolah Rakyat. Melalui pendekatan ini, guru dan wali asuh dilatih untuk berperan sebagai coach yang mampu membimbing siswa mengenali potensi diri, menetapkan tujuan hidup, serta membangun pola pikir positif dan kemandirian. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh LAN, Pusat pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, maupun lembaga pelatihan bersertifikat lainnya. Program ini menjadi sarana transformasi mindset guru dan siswa dari ketergantungan menuju mandiri.
- 5 Pelibatan Psikolog Profesional dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat**

Pemerintah perlu melibatkan psikolog profesional sebagai bagian dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Psikolog berperan dalam melakukan asesmen psikologis, memberikan intervensi pada kasus-kasus berat, serta melakukan supervisi terhadap implementasi pendampingan psikososial oleh guru dan wali asuh. Kolaborasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia, perguruan tinggi, dan Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan daerah. Kehadiran psikolog akan memperkuat integritas dan keberlanjutan sistem pendampingan berbasis keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Puspasari (2025). Sekolah Rakyat : “Kolaborasi, Implementasi dan Kontribusi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Paparan pada Kuliah Umum Prodi Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial RI.
- DetikEdu. (2025, 8 Oktober). *Tantangan Sekolah Rakyat: Murid Homesick hingga Kabur dari Sekolah*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8150710/tantangan-sekolah-rakyat-murid-homesick-hingga-kabur-dari-sekolah>.
- International Journal of Instruction (2023) *The Effectiveness of Leadership, Coaching Systems, and Organizational Climate on the Work Effectiveness of Boarding School Caregivers* <https://e-iji.net/ats/index.php/pub/article/view/100>
- Jurnal Konseling dan Pendidikan (2025). *Islamic Boarding School; Life Skill and Social Interaction Based Education to Build Student’s Independence - Moderation Test* <https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/1488/620>
- J-PAL South Asia — *Providing Life Skills Training and Mentoring to Reduce School Dropout Among Girls in India (2016-2019)*. <https://www.povertyactionlab.org/evaluation/providing-life-skills-training-and-mentoring-reduce-school-dropout-among-girls-india>
- Kementerian Keuangan RI. (2025). *Realisasi Anggaran Program Sekolah Rakyat per September 2025*.
- Presiden.go.id. (2025, 11 September). *Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat untuk Perluas Akses Pendidikan*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-targetkan-500-sekolah-rakyat-untuk-perluas-akses-pendidikan/>